

BIODATA PENULIS

Andry Indrady, Amd. Im, Grad.Dip.PA, MPA, Ph.D dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta. Mengawali karier sebagai CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 1999, penulis lalu diterima sebagai Taruna Akademi Imigrasi Angkatan IV dan lulus sebagai lulusan terbaik. Setelah lulus tahun 2003, bekerja sebagai Staf Direktur Jenderal Imigrasi, dan pada tahun yang sama mendapatkan beasiswa program Magister Administrasi Publik (MPA) di *Flinders Institute of Public Policy and Management Flinders University South Australia* dari program *DIMIA Tertiary Scholarship* (beasiswa yang diberikan oleh Departemen Imigrasi Australia) selesai pada tahun 2005. Sekembalinya dari Australia bekerja di Direktorat Kerjasama Luar Negeri Ditjen Imigrasi dan dilanjutkan bekerja sebagai Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Lalu pada tahun 2007 mendapatkan beasiswa dari *the Australian Leadership Awards (ALA) AusAid* untuk program Doktoral (Ph.D) dalam bidang Kebijakan Publik (*Public Policy*) dengan konsentrasi Kerjasama Internasional Keimigrasian di *Flinders University Adelaide Australia*. Setelah menyelesaikan studi Doktoral pada tahun 2011 lalu bekerja sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Ketarunaan pada Akademi Imigrasi (AIM) dan tidak lama kemudian diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. Setelah itu, diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Keimigrasian di atas Alat Angkut Ditjen Imigrasi. Lalu melanjutkan kariernya dengan menjabat sebagai Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan. Setelah itu mengikuti proses open bidding untuk jabatan Konsul Imigrasi pada KJRI Hong Kong. Setelah terpilih, bertugas di wilayah akreditasi Hong Kong SAR dan Macau SAR. Dan setelah kembali dari penugasan sebagai Konsul Imigrasi di KJRI Hong Kong, ditugaskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Wakil Direktur I bidang Akademik dan Peserta Didik pada Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM RI sampai dengan sekarang.

Oki Wahyu Budijanto, lahir di Jakarta tanggal 27 Oktober 1976. Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Fungsional Peneliti Ahli Madya Bidang Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (selesai tahun 2001), kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (selesai tahun 2007). Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI (2003), Pendidikan dan Pelatihan Metodologi Penelitian LIPI (2004) serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan LIPI (2016). Pendidikan dan Pelatihan Struktural: Diklat Kepemimpinan Tk. IV (2009) dan Diklat Kepemimpinan Tk. III (2013). Disamping itu, pernah mengikuti *Human Rights Training for Indonesia Agencies di New Zealand* (2007). Pengalaman menjadi Narasumber pada acara sosialisasi di beberapa daerah: Kabupaten Jember dan Kabupaten Semarang (terkait dengan Evaluasi Efektivitas Forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksanaan dan Kepolisian dalam Kerangka *Integrated Criminal Justice System*) serta Kabupaten Tarutung, Kabupaten Lebak, Kabupaten Klungkung (terkait dengan Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin)

Nicken Sarwo Rini, S.H. Lahir di Padang 3 April 1981, bekerja sebagai Peneliti Pertama Bidang Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM R.I pada Unit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Menuntaskan pendidikan S1 Hukum pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006. Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tentang Fungsional Peneliti yang diselenggarakan oleh LIPI pada tahun 2009. Riwayat kegiatan penelitian yang dilakukan: sebagai Ketua Penelitian Tanggungjawab Pemerintah terhadap Pelestarian Seni Tradisional dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat Tahun 2014; Ketua Penelitian Peran Negara terhadap Tanggungjawab Bisnis Perusahaan Tambang dalam Penghormatan HAM Tahun 2015; Ketua

Penelitian Prinsip Non Diskriminasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2016; Ketua Penelitian Analisis Dampak HAM terhadap Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Tahun 2017; Ketua Penelitian Penyusunan Indikator Bisnis dan HAM: Studi Baseline tentang Relasi antara Bisnis sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Pariwisata Tahun 2018; Tim Penyusun Buku Pedoman Panduan Umum Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Tahun 2018. Pengalaman menjadi narasumber: Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan HAM yang berjudul "Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin" di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan HAM yang berjudul "Implementasi Peran Negara Terhadap Bisnis Perusahaan Tambang dalam Sudut Pandang HAM" di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016; Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan HAM yang berjudul "Peran Negara terhadap Bisnis Perusahaan Tambang" di Kabupaten Lumajang Tahun 2016; Stakeholder Meeting Pemanfaatan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM yang berjudul "Pemantauan dan Pengawasan Pilkada Melalui Perlibatan Masyarakat" di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017; Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM yang berjudul "Perlibatan Masyarakat Melalui Pemantauan Pilkada" di Provinsi Lampung Tahun 2017; Fasilitas Melaksanakan Pengembangan Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM yang berjudul "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Hak Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM yang berjudul "Analisis Dampak HAM terhadap RUU Minerba" di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018; Pertemuan Ilmiah mengenai Penguatan Peran Negara dalam Perlindungan HAM dengan makalah yang berjudul "*Baseline Study* Pembentukan Indikator Bisnis dan HAM". Alamat kantor Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Alamat e-mail: nicken.sarwo.rini@gmail.com, HP. 087883450877

Wicipto Setiadi dilahirkan di Purbalingga, 11 September 1957. Menyelesaikan S 1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1982. Kemudian melanjutkan Program S 2 pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung lulus tahun 1991. Melanjutkan Program S 3 (Doktor) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus tahun 2003. Saat ini sebagai Dosen HTN pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Sebelumnya pernah menjadi Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM tahun 2015-2017, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014-2015, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010-2014. Kursus/pelatihan yang pernah diikuti: Kursus *Legislative Drafting* di Belanda, tahun 1985-1986; Program *Stage* pada *Van Vollenhoven Institute, Leiden University*, Belanda, tahun 1996; Training Seminar Hukum Internasional dan Hukum Dagang Internasional, Kerja sama *The Australian Attorney General's Department* – Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 10 s.d. 14 April 2000. *International Law Course, Monash University, Melbourne*, Australia, Mei s.d. Juni 2000; *Disruption Training, Reformulating Strategy in the Era of Disruption*, Rumah Perubahan Rhenald Kasali, 17 – 18 Mei 2017; Pelatihan Reviewer Penelitian Angkatan XVII 23-27 September 2019. Penulis buku dengan judul: *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, Penerbit Rajawali Pers, 1994. Penulis artikel dalam beberapa jurnal antara lain: *Pembangunan Hukum Nasional*, Dalam Buku *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., Editor: Elly Erawaty, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011; Naskah Akademik Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 8 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Desember 2011; *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum

dan HAM RI, April 2012; Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 3, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Desember 2012; Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Buku Kumpulan Tulisan) Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Cetakan Pertama, Juli 2014; Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 3, September 2018; Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha (*Simplification of Regulations in Order to Support Ease of Doing Business*), Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, No. 3, Desember 2018; *The Urgency of Regulatory Reform in Order to Support Indonesia's National Development*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Volume 7, No. 4, December 2018

Rakha Aditya Afrizal dilahirkan di Surabaya pada tanggal 8 Juni 1997. Menyelesaikan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta pada Tahun 2019. Saat menjadi mahasiswa aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Hakki Fajriando, S.Sos., M.Si., Bekerja Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Lahir di Jakarta 6 September 1982. Menyelesaikan Pendidikan S1 di FISIP Universitas Indonesia Tahun 2005. Magister Sains Universitas Indonesia Program Pascasarjana tahun 2008. Jabatan sekarang adalah Peneliti Muda. Alamat di Jalan Kemang 3 B 50 Perum Pekayon Jaya 2 Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17148. E-mail: hakki@balitbangham.go.id. HP. 082181738383

Insan Firdaus, Bekerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Lahir di Jakarta, 8 November 1981. Menyelesaikan Pendidikan S1 Sarjana Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang 2003. S2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul 2016. Jabatan sekarang adalah Peneliti Muda. Alamat: Jl. Citarum I Tangerang. e-mail: firdaus_insan@yahoo.co.id, HP. 081315684123

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. adalah dosen di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2006. Zendy menyelesaikan Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2004. Di tahun 2011, Zendy menyelesaikan Master of Laws Program di *Master of Human Rights and Humanitarian Law Program, European University Viadrina Frankfurt* (Oder) di Jerman dan mendapatkan gelar LL.M. Judul tesisnya adalah "*Prohibition of Sale of Children: Legal Consequences of the Ratification of the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography by Indonesia*". Sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, Zendy juga menjabat sebagai Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beberapa mata kuliah yang diajarkan adalah Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia, Hukum Kewarganegaraan, Kewarganegaraan, dan Hukum Pemilu. Selain mengajar, Zendy juga melakukan penelitian, berpartisipasi aktif di konferensi dan menulis artikel ilmiah. Zendy tertarik melakukan penelitian dan menulis terutama di bidang Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia terutama Hak Anak, serta Hukum Kewarganegaraan. Beberapa publikasinya yang terakhir adalah: "*Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children's Rights Against Child Marriage*" dan "*Non-Discrimination Principle in The Indonesian Legislation Concerning Children*". Selain itu, Zendy juga merupakan anggota dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan beberapa kali terlibat dalam kerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah untuk mengerjakan draft Peraturan Daerah

Antonio Rajoli Ginting, lahir di Rantau Prapat, 12 Juni 1990. Lulus Strata 1 Ilmu Hukum, Universitas Lampung. Memulai karir sebagai Aparatur Sipil Negara Tahun 2015 sebagai Fungsional Umum di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Penulis memulai karir sebagai Peneliti Ahli Pertama di Badan Penelitian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2019. Sebelum diangkat menjadi peneliti, penulis telah mengikuti beberapa kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian yang pernah diikuti antara lain: Analisis Kebutuhan Penempatan Auditor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (2016), Peran Unit Pemberantasan Pungli Kementerian Hukum dan HAM untuk Mendorong Akuntabilitas dan Integritas Pegawai dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (2017) Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2018), dan Pelindungan Hak Atas Desain Industri dalam Mendorong Perekonomian (2019)

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan Kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
 - Artikel hasil Penelitian
 - Artikel hasil Kajian
 - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 25 halaman biasa (A4), termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 25 halaman biasa (A4), redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
 - **Judul;**
Judul ditulis secara singkat maksimal 14 kata, ukuran 13, bold, dalam bahasa Indonesia (huruf kapital [*UPPERCASE*] *bold font style*) dan Inggris (huruf kapital di awal kalimat [*Capitalize Each Word*] *italic bold font style*)
Identitas penulis diketik di bawah judul yang meliputi nama penulis tanpa gelar, tempat bekerja, alamat unit kerja, serta nomor telepon, faks, dan email penulis, ditulis menggunakan *bold font style*. Diketik di bawah judul yang meliputi nama penulis tanpa gelar, tempat bekerja, alamat unit kerja, serta nomor telepon, faks, dan email penulis, ditulis menggunakan *bold font style*.
 - **Abstrak**
Abstrak memberikan ringkasan singkat dari isi yang memuat latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan saran tanpa menyertakan gambar, tabel, atau referensi. Abstrak tidak melebihi 200 kata. Ditulis dalam bahasa Indonesia (*regular font style*) dan Inggris (*italic font style*). Abstrak memberikan ringkasan singkat dari isi yang memuat latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan saran tanpa menyertakan gambar, tabel, atau referensi. Abstrak tidak melebihi 200 kata. Ditulis dalam bahasa Indonesia (*regular font style*) dan Inggris (*italic font style*).
Kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Minimal 3 kata maksimal 5 kata ditulis menggunakan *bold font style*. Ditulis dalam bahasa Indonesia (*regular font style*) dan Inggris (*italic font style*).

- **Pendahuluan (berisikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)**
- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
- **Pembahasan (teori dan bahasan berdasarkan data)**
- **Penutup (kesimpulan dan saran)**
- **Daftar Pustaka**

Setiap item naskah (abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, pembahasan, dan penutup) di tulis dengan huruf Arial 13 *bold style*.

7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :

- **Judul**
- **Abstrak**
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
- **Pendahuluan**
Berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan.
- **Pembahasan**
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
- **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
Berisikan Kesimpulan dan Saran
- **Daftar Pustaka**

Sistematika penulisan jurnal dapat dilihat pada Template Naskah pada <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan>

8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1 spasi. Menggunakan huruf arial 11 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic font style*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing ditulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya ditulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (*footnote*). Kutipan disisipkan dengan *Mendeley tools, Turabian 8th edition (full note) style* menggunakan huruf arial 10.
- A. Kutipan (foot note) disisipkan dengan *Mendeley tools, Turabian 8th edition (full note) style* menggunakan huruf arial 10.
- B. Penulisan Daftar Pustaka
- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutakhir
 - Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
 - Penggunaan refenesi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Disusun dengan melakukan insert bibliografi pada Mendeley Tools. Referensi utama adalah artikel jurnal, dan buku (terbitan 5 tahun terakhir), tidak termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. Referensi tambahan berupa peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. Panjang halaman maksimal 2 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf hanging 1 cm (Huruf Arial font 11, spasi 1).
10. Naskah wajib dikirim melalui <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan>